

HUBUNGAN ANTARA KINERJA PEMERINTAH KELURAHAN DENGAN EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN SOSROMENDURAN

Riskal Krismayanto Lawuno, Oberlin Silalahi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta

Korespondensi penulis: riksalk@gmail.com, oberlin_up45@yahoo.com

Abstrak

Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan hubungan antara kinerja pemerintah kelurahan dengan efektivitas program pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat (Studi di Kelurahan Sosromenduran, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta).

Subjek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang berwenang di Kelurahan Sosromenduran untuk memperoleh keterangan, informasi, dan penjelasan dari narasumber terkait dengan kinerja pemerintah kelurahan dan efektivitas program pembangunan sarana prasarana (fisik) dan pemberdayaan masyarakat (non-fisik). Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik analisis dalam penelitian ini melalui analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan hasil sebagai berikut: 1) Kinerja Pemerintah Kelurahan Sosromenduran sudah berjalan baik dengan pengelolaan semua anggaran DAU Tambahan TA 2019. 2) Efektivitas Program Pembangunan Sarana Prasarana Dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sosromenduran sudah berjalan baik dan efektif pada pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik, sedangkan pada kegiatan pembangunan non-fisik belum sepenuhnya efektif. 3) Terdapat hubungan antara Kinerja Pemerintah Kelurahan yang berorientasi pada proses pelaksanaan kegiatan dengan mendukung tingkat pencapaian Efektivitas Program pada kegiatan fisik, namun belum sepenuhnya mendukung tingkat Efektivitas pada kegiatan non-fisik.

Kata Kunci: DAU Tambahan, Kinerja Pemerintah Kelurahan, Efektivitas Program

Abstract

Descriptive qualitative research aims to describe the relationship between government performance of urban village by the effectiveness of the program building of infrastructure and community empowerment (studies in urban village, gedongtengen sub district, the city of yogyakarta, Yogyakarta special region).

A Subject in this research is authorized on to receive explanation, sosromenduran urban village, information and explanation from speakers relating to the performance of sub district government and the program effectiveness building of infrastructure physical and community empowerrnt. Data collection techniques using a method of, interview, documentation and observation. In this research analysis techniques to analyzing descriptive.

The results of studies show the result as follows: 1) performance sub district government sosromenduran been going well with the management of all the fund additional 2019. 2) the effectiveness of the building of infrastructure and community development at village sosromenduran been going well and effectively in the implementation of physical development activities, while in development activities non-fisik not yet fully effective. 3) there is the relationship between the performance of sub district government that is oriented to the process implementation of activities by supporting achievement levels in the program effectiveness in physical activities, but have not fully support the effectiveness on non fisik activities.

Key Words: *DAU Additional, Performance sub District Government, The Effectiveness of Successor Programs.*

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (PERMENDAGRI) Nomor 130 Tahun 2018 tentang kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dengan ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud: ayat (1)

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. (2) Kecamatan atau disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat. (3) Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan. Kemudian Pasal 2 Peraturan Menteri ini mengatur kegiatan: a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan: b. Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan.

Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, yang meliputi pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, transportasi, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan. Sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat yang ada di Kelurahan, digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi sumber daya sendiri, seperti pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, pendidikan dan kebudayaan, pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, lembaga kemasyarakatan, ketenteraman dan ketertiban umum (Trantibum), perlindungan masyarakat (Linmas), dan penguatan

kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa.

Untuk Kota Yogyakarta sendiri telah mendapatkan Alokasi Dana DAU Tambahan sebesar Rp 15,8 miliar. Dana tersebut diterima 45 Kelurahan se-Kota Yogyakarta yang dicairkan pada bulan Maret 2019. Rata-rata setiap Kelurahan di Kota Yogyakarta mendapatkan anggaran DAU Tambahan sebesar Rp 352 Juta Rupiah. Untuk Kelurahan Sosromenduran, mendapatkan anggaran Dana Kelurahan atau DAU Tambahan sebesar Rp 352 Juta untuk Tahun Anggaran 2019. Dana ini mempunyai prinsip penggunaan untuk upaya meningkatkan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Serta Pemberdayaan Kesejahteraan Masyarakat.

Kelurahan Sosromenduran, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta adalah salah satu kelurahan yang mendapatkan alokasi anggaran dana kelurahan sehingga didasarkan atas lokasi yang mudah diakses oleh peneliti maka kelurahan ini menjadi objek penelitian penulis dikarenakan Kelurahan ini merupakan salah satu bagian Kecamatan dari lima Kecamatan yang mendapatkan predikat terbaik untuk tingkatan Kota Yogyakarta, dengan kategori penilaian dari kinerja pemerintahan, penggunaan teknologi informasi, tanggap bencana, inovasi, partisipasi masyarakat, investasi, pendidikan dan kesehatan. Untuk itu, Kelurahan Sosromenduran merupakan Kelurahan yang semestinya maju dan mampu di dalam mengelola Anggaran Dana Kelurahan yang dalam hal ini ialah Dana Alokasi Umum Tambahan atau disingkat (DAU Tambahan).

Berdasarkan hasil pra-survei, peneliti mengamati kondisi yang ada di Kelurahan Sosromenduran dengan sarana prasarana di Kelurahan yang telah terlaksana. Pertama, hal ini didasarkan atas pengamatan peneliti

di lapangan. Seperti sudah adanya drainase dan selokan, akses jalan pemukiman antar kampung yang tampak terlihat baru saat peneliti melakukan survei di sekitar Kelurahan Sosromenduran. Kedua, dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, ada beberapa kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti dilaksanakannya kegiatan pelatihan pembudidayaan lele cendol kampung Jogonegaran, kegiatan pelatihan pembudidayaan lorong sayur yang berlokasi di RW 14 Jogonegaran, serta kegiatan pelatihan barista. Beberapa kegiatan tersebut berdasarkan pantauan peneliti pada portal berita Pemerintah Kota Yogyakarta bagian Kelurahan Sosromenduran. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kelurahan Sosromenduran berdasarkan hasil prasuvei peneliti.

Kelurahan Sosromenduran termasuk Kelurahan yang menunjukkan mampu menerapkan Kebijakan penggunaan Dana Kelurahan berupa DAU Tambahan untuk pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat atas amanah Permendagri No 130 tahun 2018 tentang pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan. Kemudian lebih lanjut peneliti tertarik untuk melihat bagaimana kinerja pemerintah Kelurahan dalam menghasilkan output seperti pengamatan peneliti di Kelurahan Sosromenduran ini, karena pemahaman peneliti faktor kinerja organisasi berpengaruh dalam mengimplementasikan suatu kebijakan yang diberikan, dan juga merupakan instrumen yang mungkin akan mendukung efektivitas dari program atau kegiatan, dalam hal ini yaitu kegiatan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan dan akan mempengaruhi hasil dari pembangunan itu sendiri.

Pelaksanaan Kebijakan Penggunaan Dana Kelurahan seperti DAU Tambahan ini membutuhkan persepsi dari pimpinan dan masyarakat Kelurahan untuk melihat sejauhmana pelaksanaan dari Penggunaan anggaran DAU Tambahan tersebut, mengingat maksud dari program Dana Kelurahan berupa DAU Tambahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Kabupaten/kota ialah untuk membiayai program Pemerintah Kelurahan dalam melaksanakan pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat. Dalam hal ini peneliti berfokus pada Kinerja Pemerintahan Kelurahan dalam pelaksanaan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan dan melihat sejauh mana Efektivitas Program atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan kebijakan terutama di Kelurahan Sosromenduran, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. KAJIAN PUSTAKA

B. 1Kinerja Organisasi Publik (Kinerja Pemerintah Kelurahan)

Pengertian kinerja menurut Wibowo (2008:7), kinerja berasal dari pengertian *performance* yaitu sebagai hasil kerja atau prestasi kerja. Kinerja berkaitan dengan melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari suatu pekerjaan. Selain itu menurut Armstrong dan Baron dalam (Wibowo 2008:7), kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi pada ekonomi.

Indikator kinerja menurut pendapat Mahmudi (2015:153), mengatakan bahwa indikator kinerja merupakan sarana atau alat (*means*) untuk mengukur hasil suatu

aktivitas, kegiatan, atau proses dan bukan hasil atau tujuan itu sendiri (*ends*).

Indikator kinerja menurut Mahsun (2006:77-78) ia mengemukakan beberapa Indikator untuk mengukur kinerja organisasi adalah sebagai berikut:

(a)Masukan (input)

Masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini mengukur perencanaan, jumlah sumber daya seperti anggaran (dana), sumber daya manusia, peralatan, material dan masukan lain. Yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan. Misalnya:

- Jumlah dana yang dibutuhkan,
- Jumlah pegawai yang dibutuhkan,
- Jumlah infrastruktur yang ada.

(b)Proses (proses)

Dalam indikator proses, organisasi merumuskan ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Rambu yang paling dominan dalam proses adalah tingkat efisiensi dan ekonomis pelaksanaan kegiatan organisasi. Misalnya: Ketaatan pada peraturan perundangan/Kebijakan.

(c)Keluaran (output)

Keluaran adalah suatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non-fisik. Indikator atau tolok ukur keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Misalnya: Jumlah produk atau jasa yang dihasilkan, serta ketepatan dalam memproduksi barang atau jasa.

Pada penelitian yang dilakukan peneliti Konsep Kinerja Organisasi yaitu Kinerja Pemerintah Kelurahan adalah berorientasi pada tahapan proses pelaksanaan anggaran DAU Tambahan TA 2019 untuk mencapai kegiatan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan dengan berbagai usaha-usaha, aktivitas maupun proses kerjasama antar pelaksana.

B. 2Efektivitas Program Pembangunan Sarana Prasarana Dan Pemberdayaan Masyarakat

Efektifitas menurut Hidayat (1986), menyatakan efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target kuantitas, kualitas, dan waktu telah tercapai. Semakin besar persentase target yang dicapai, maka semakin tinggi efektivitasnya. Indikator Efektivitas Program menurut Sutrisno (2007:125-126), yaitu yang perlu diperhatikan untuk mengetahui sejauh mana keefektivan sebuah program atau suatu kegiatan diantaranya:

(a)Pemahaman Program

Pada indikator ini yang dimaksudkan adalah bagaimana suatu program direalisasikan sehingga dapat dengan mudah diterima dan dipahami. Hal ini dimaksudkan ketika program dijalankan dapat dengan mudah dan efektif dalam proses pelaksanaannya. Pihak yang perlu memahami program ini adalah semua pihak yang terlibat dalam proses kegiatan program tersebut.

(b)Ketepatan Sasaran

Sasaran dibahas pada indikator ini merupakan hal yang perlu ditinjau langsung akan keberadaan program. Karena keberadaan program yang dirancang apakah sudah tepat sasaran sesuai dengan

aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu program dapat dikatakan efektif apabila program sesuai dengan sasaran yang telah dilakukan sejak awal.

(c) Ketepatan Waktu

Indikator selanjutnya adalah ketepatan waktu, waktu merupakan hal yang sangat penting dalam suatu proses kehidupan. Ketepatan waktu dalam hal ini suatu program dikatakan efektif apabila pelaksanaan program sesuai dengan aturan waktu. Semakin tepat pada saat pelaksanaan program maka semakin efektif program dapat terealisasi.

(d) Tercapainya Tujuan

Pada indikator ini menilai tingkat keefektifan suatu program dengan mengetahui bagaimana tujuan yang telah ditetapkan sejak awal dapat dicapai. Tercapainya tujuan pada program dilihat dari sejauh mana beberapa tujuan yang sudah menjadi aturan sejak awal program atau kegiatan ini dapat tercapai. Semakin banyak memberikan manfaat dapat dikatakan efektif apabila tujuan telah dicapai.

(e) Perubahan Nyata

Mengukur keefektifan dengan memberikan perubahan nyata, dimaksudkan bahwa aturan yang telah ditetapkan sejak awal dapat direalisasikan dengan baik sesuai dengan rencana. Kemudian sasaran dari program ini juga berperan penting dalam melaksanakan program. Artinya dengan melihat, meninjau, dan meneliti langsung apakah memberikan perubahan bagi para warga masyarakat. Perubahan bisa terjadi dalam

kategori dampak positif maupun negatif.

Pada penelitian yang dilakukan, Konsep Efektivitas Program yang dimaksud, Efektivitas program adalah penilaian tentang kegiatan yang dilaksanakan untuk melihat sejauh mana tingkat pencapaian sasaran dari program itu dibuat dan dapat menjadi suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target kuantitas, kualitas, dan waktu telah tercapai. Semakin besar persentase target yang dicapai, maka semakin tinggi efektivitasnya.

B. 3 Hubungan Antara Kinerja Pemerintah Kelurahan Dengan Efektivitas Program Pembangunan Sarana Prasarana Dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Kinerja organisasi dalam hal ini Kinerja Pemerintah Kelurahan adalah gambaran mengenai proses pelaksanaan DAU Tambahan TA 2019, tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategis planning suatu organisasi, namun apakah dengan hanya melihat kinerja sampai pada pencapaiannya pada melaksanakan suatu kebijakan yang telah diatur dan mempunyai wujud program atau kegiatannya saja yang kemudian menyerap dana yang dianggarkan. Maka dari itu diperlukan penilaian sampai pada Efektivitas program, Efektivitas Program disini melihat sejauhmana program atau kegiatan yang telah dihasilkan dari kinerja sebelumnya dapat memberikan manfaat yang berkepanjangan kepada siapa warga masyarakat.

Kinerja Pemerintah Kelurahan akan mempengaruhi tingkat Efektivitas program dengan harus benar-benar memahami tujuan dari rumusan awal suatu kebijakan, sehingga nantinya akan mempengaruhi hasil program

dan menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi bagi kelurahan untuk menilai seberapa jauh tingkat pelaksanaan Program atau kegiatan yang dijalankannya. Dalam hal ini yang dimaksudkan ialah tentang dana kelurahan berupa anggaran DAU Tambahan untuk kegiatan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan sesuai dengan amanah Pemerintah Pusat.

C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dan pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif (Saryono, 2010:1). Selain itu, menurut Moleong dalam Herdiansyah (2010:9) Penelitian kualitatif juga merupakan suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.

D. PENYAJIAN DAN PEMBAHASAN

D.1 Regulasi Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan TA 2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2018 Tentang Tata Cara Penyaluran DAU Tambahan Tahun Anggaran 2019 berdasarkan keterangan pers di Jakarta 31 Desember 2018, dikatakan bahwa dalam APBN 2019, telah dialokasikan DAU Tambahan Sebesar Rp 3 Triliun untuk 8.212 Kelurahan pada 410 Kabupaten dan Kota. Anggaran tersebut digunakan untuk

mendukung pendanaan Pemerintah Daerah kepada Kelurahan melalui APBD sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan. Anggaran tersebut digunakan untuk Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.

Dalam rangka mengatur lebih lanjut mengenai penyaluran DAU Tambahan dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang APBN Tahun Anggaran 2019, maka Kementerian Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 187/PMK.07/2018 Tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019. Pada prinsipnya, PMK tersebut mengatur mengenai alokasi, tahapan, besaran dan syarat penyaluran, serta mekanisme pelaporan DAU Tambahan Tahun Anggaran 2019. Sedangkan pemanfaatan DAU Tambahan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.

D.2 Realisasi Pelaksanaan Program Pembangunan Sarana Prasarana Dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sosromenduran

kegiatan yang dilaksanakan di kelurahan sosromenduran yaitu; Pertama, kegiatan pelatihan lele cendol dengan realisasi dananya sebesar Rp, 7.750.000,00. Kedua, kegiatan pelatihan barista dengan realisasi dananya sebesar Rp, 3.797.500,00. Ketiga, kegiatan pelatihan kader pembudidayaan lele cendol dengan realisasi dananya sebesar Rp, 17.145.000,00. Dan yang ke-empat adalah kegiatan pelatihan pembudidayaan tanaman sayur dengan realisasi dananya sebesar Rp, 6.680.400,00. Jadi total dari pelaksanaan anggaran pada

kegiatan non-fisik adalah sebesar Rp. 35.372.900,00. Sehingga jika dijumlahkan, realisasi dana dari pelaksanaan kegiatan fisik dan non-fisik adalah sebesar Rp, 347.454.900,00, kemudian sisa anggaran dari DAU Tambahan Tahun Anggaran 2019 ini adalah sebesar Rp, 5.486.100,00 dan akan dianggarkan pada program dan atau kegiatan berikutnya yaitu pada periode Tahun Anggaran 2020.

D.2.1 Kinerja Pemerintah Kelurahan Sosromenduran a) Masukan (*Input*)

Pada indikator Masukan (*input*) dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, dapat diketahui bahwa tahap masukan ini telah berjalan dengan baik, mulai dari sumber dana yang ada, perencanaan kegiatan-kegiatan yang sesuai kebutuhan, dan penentuan sumberdaya manusia dalam pelaksanaannya. Sampai pada tahap masukan ini Pemerintah Kelurahan Sosromenduran juga siap dan mampu untuk menjalankan tugas yang diberikan oleh Pemerintah Kota melalui Kecamatan untuk mengemban tugas yang diberikan kepada Kelurahan Sosromenduran ini seperti pada beberapa data berupa hasil wawancara yang dilakukan oleh Penulis. **b) Proses (*Procces*)**

Dari hasil penelitian pada indikator Proses, dapat diketahui bahwa pelaksanaan dan konsistensi waktu pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan tujuan pada ketetapan sebelumnya yang disepakati pada Musrebangkel tahun 2018 sebelumnya. Pelaksanaan kegiatan pada kegiatan Pembangunan fisik, meskipun pelaksanaannya adalah pihak ke tiga, namun ada upaya dari pihak Kelurahan Sosromenduran untuk mencari solusi agar terlaksananya kegiatan fisik tersebut, kemudian pelaksanaan kegiatan non-fisik yaitu pelatihan barista, pelatihan budidaya lele cendol, dan pelatihan budidaya sayur dilakukan oleh pihak

Kelurahan Sosromenduran dan warga masyarakat. Sedangkan pada aturan waktu pelaksanaan sudah berjalan baik dan sesuai dengan aturan tata kala pelaksanaan kegiatan yang ada pada jadwal yang telah diatur sebelumnya, artinya waktu pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan harapan.

c) Keluaran (*Output*)

Pada Indikator Keluaran yang di dalamnya melihat bentuk-bentuk kegiatan dan ketepatan menghasilkan kegiatan yang sesuai kebutuhan warga masyarakat Kelurahan Sosromenduran itu sudah terlihat wujud dari kegiatannya dan sudah sesuai kebutuhan warga masyarakat dengan mengutamakan skala prioritas. Artinya pelaksanaan anggaran DAU Tambahan TA 2019 sudah terserap sepenuhnya untuk pengerjaan fisik dan non-fisik untuk warga sosromenduran dengan melibatkan warga masyarakat dalam bentuk memberikan kesempatan kepada warga untuk menyuarakan apa saja kebutuhan yang mereka inginkan saat adanya anggaran dana untuk kelurahan.

D.2.2 Efektivitas Program Pembangunan Sarana Prasarana Dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sosromenduran

a) Pemahaman Program

Pada indikator Pemahaman Program dapat diketahui bahwa masyarakat sudah memahami tentang adanya pelaksanaan kegiatan berupa kegiatan pembangunan fisik dan non-fisik yang didanai oleh DAU Tambahan TA 2019 tersebut. Dapat dilihat dari sosialisasi yang telah disampaikan pihak Kelurahan kepada warga masyarakat saat pelaksanaan Musrebangkel sebelumnya dengan menyampaikan bahwa telah ada DAU Tambahan untuk diperuntukan pada kegiatan Pembangunan fisik dan non-fisik di Kelurahan Sosromenduran. Sekaligus warga masyarakat dapat memahami dan menerima kegiatan-kegiatan tersebut karena pada saat

perumusan kegiatan, usulan-usulan yang berawal dari warga masyarakatlah yang dijadikan program atau kegiatan dilapangan dengan mempertimbangkan skala prioritas yang telah disepakati sebelumnya.

b)Ketepatan Sasaran

Dari hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa program/kegiatan-kegiatan fisik dan nonfisik yang sudah terlaksana sebelumnya sudah tepat sasaran dan sudah sesuai dengan perencanaan di Musrembangkel. Namun, melalui Skala Prioritas mana kegiatan yang lebih dulu perlu untuk dikerjakan. Hal tersebut juga sudah sesuai dengan tujuan pelaksanaan DAU Tambahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat yaitu dananya yang diberikan adalah untuk Kegiatan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan, artinya penggunaan anggaran DAU Tambahan TA 2019 di Kelurahan Sosromenduran ini juga sudah tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan Kebijakan yang diberikan oleh Pemerintah.

c)Ketepatan Waktu

Penulis memperoleh informasi bahwa terkait dengan tingkat penggunaan waktu dalam pengerjaan kegiatan fisik dan kegiatan non-fisik di Kelurahan Sosromenduran pada saat itu sudah berjalan sesuai dengan aturan waktu yang ditetapkan, dan pada pelaksanaannya telah berjalan dengan tepat sampai pada terlaksananya pengerjaan fisik dan kegiatan non-fisik berupa pelatihan-pelatihan di wilayah Sosromenduran. Sehingga dalam indikator Ketepatan waktu ini, penulis mendapatkan keterangan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut sudah berjalan efektif karena pada pelaksanaan kegiatan fisik dan kegiatan non-fisik di Kelurahan Sosromenduran.

d)Tercapainya tujuan

Pada indikator Tercapainya Tujuan dengan melihat manfaat yang dirasakan langsung oleh warga setelah adanya kegiatan baik fisik dan non-fisik, penulis mendapatkan keterangan bahwa tujuan dari pelaksanaan kegiatan fisik yaitu pengerjaan SAH, SPAH, dan Konblok sudah baik dengan memberikan manfaat langsung kepada warga RW 05, RW 06 dan RW 07 yang dimana sudah tidak adanya air hujan yang menggenang, jalan yang tertata rapi serta memberikan lingkungan yang lebih rapi di wilayah tersebut.

Sedangkan pada kegiatan non-fisik berupa pelatihan Barista, Pelatihan Pembudidayaan Lele Cendol, dan Pelatihan Pembudidayaan Tanaman Sayur ini. Ada dua pelatihan yang belum memberikan tingkat pencapaian tujuan berupa manfaat yang berkelanjutan terhadap kegiatan tersebut yaitu kegiatan Pelatihan Barista yang belum memberikan manfaat langsung dan berkelanjutan kepada warga masyarakat, dan juga Pelatihan Pembudidayaan Lele Cendol yang hanya berjalan sampai pada saat panen pertama dan belum memberikan manfaat berkelanjutan bagi warga terutama di wilayah RW 14 kampung Jogonegaran.

Namun lebih lanjut untuk kegiatan non-fisik pada Pelatihan Pembudidayaan Tanaman Sayur yang telah dilaksanakan di RW 14 kampung Jogonegaran dapat dikatakan sudah efektif dengan memperlihatkan pencapaian tujuan yang baik dengan memberikan manfaat yang berkelanjutan kepada warga seperti adanya aktivitas-aktivitas warga dalam menanam sayur, menjadikan sumber pangan bagi warga, sekaligus menjadi sumber pemasukan warga dengan menjual bibit tanaman ke tempat lain, artinya Pelatihan Pembudidayaan Tanaman Sayur ini telah memberikan dampak kepada warga termasuk yang ada di wilayah RW 14 kampung

jogonegaran terutama pada RT 51 dan RT 52 Sesuai hasil Observasi yang dilakukan Penulis saat melakukan Penelitian.

e)Perubahan Nyata

Pada indikator Perubahan Nyata yaitu dengan melihat perubahan yang terjadi setelah diadakannya Kegiatan fisik berupa SAH, SPAH, dan Konblok telah memberikan perubahan secara langsung kepada warga masyarakat yang terdampak atau di wilayah diadakannya pembangunan fisik tersebut. Indikator Perubahan Nyata pada kegiatan fisik disini dapat dikatakan efektif karena memberikan perubahan yang tampak secara fisik seperti adanya SAH, SPAH, dan Konblok di wilayah-wilayah tersebut, serta memberikan perubahan berupa kepuasan kepada warga atas direalisasinya usulan-usulan yang mereka butuhkan terutama pada pengerjaan fisik. Sedangkan pada Kegiatan non-fisik hanya efektif pada satu kegiatan yaitu pada Pelatihan Pembudidayaan Tanaman Sayur dan belum efektif pada Pelatihan Barista dan Pembudidayaan Lele Cendol karena belum memberikan perubahan yang nyata setelah dilaksanakan.

D.2.3 Hubungan Antara Kinerja Pemerintah Kelurahan Dengan Efektivitas Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Sosromenduran

Kinerja Pemerintah Kelurahan Sosromenduran hanya dapat mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan yang anggarannya dari DAU Tambahan TA 2019 untuk kegiatan pembangunan fisik saja. Sedangkan pada kegiatan non-fisik Kinerja Pemerintah Kelurahan yang berorientasi pada proses pelaksanaan ini, belum mendukung secara penuh tingkat pencapaian tujuan untuk kegiatan nonfisik. Karena berdasarkan hasil temuan pada variabel

Efektivitas Program, ada dua kegiatan yang belum memberikan manfaat berkelanjutan dan perubahan nyata kepada warga masyarakat yaitu kegiatan Pelatihan Barista dan Pelatihan Pembudidayaan Lele Cendol.

Hubungannya adalah Kinerja Pemerintah Kelurahan sesuai konsep adalah proses pelaksanaan kegiatan, lebih mendukung tingkat Efektivitas Program dari kegiatan yang bersifat fisik, dan belum sepenuhnya mendukung tingkat Efektivitas Program yang bersifat non-fisik.

E. PENUTUP

E.1 KESIMPULAN

E.1.1 Kinerja Pemerintah Kelurahan Sosromenduran

Kinerja Pemerintah Kelurahan dalam pelaksanaan anggaran DAU Tambahan TA 2019 ini dapat dinyatakan sudah berjalan dengan baik dan memenuhi pendekatan indikator Kinerja Pemerintah Kelurahan yaitu dengan memulai perencanaan kegiatan di musrembangkel, penentuan sumberdaya, sumberdana yang jelas, pelaksanaan kegiatan sesuai kesepakatan bersama, waktu pelaksanaan berdasarkan tata kala kegiatan, dan bentuk-bentuk kegiatan yang terlaksana sesuai dengan kebutuhan warga masyarakat, baik itu kegiatan fisik dan kegiatan non-fisik sampai pada terealisasinya kegiatan-kegiatan tersebut.

E.1.2Efektivitas Program Pembangunan Sarana Prasarana Dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sosromenduran

Efektivitas Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sosromenduran, dengan menggunakan pendekatan indikator Efektivitas Program, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

- a. Terkait dengan kegiatan Fisik sudah berjalan efektif mulai dari sosialisasi yang telah dilakukan, masyarakat telah memahai dan menerima kegiatan fisik yang sudah dilaksanakan, kegiatan fisik yang direalisasikan sudah tepat sasaran, pengerjaannya di lapangan sudah sesuai aturan waktu, memberikan manfaat kepada warga masyarakat di wilayah diadakannya kegiatan fisik, dan memberikan perubahan yang nyata kepada warga Kelurahan Sosromenduran yang terdampak kegiatan pembangunan fisik tersebut.
- b. Untuk Kegiatan Non-fisik hanya efektif pada satu kegiatan berupa Pelatihan Pembudidayaan Tanaman Sayur dengan memenuhi kriteria pada pendekatan Indikator Efektivitas Program. Sedangkan pada Kegiatan Pelatihan Barista dan Pelatihan Pembudidayaan Lele Cendol menunjukan belum sepenuhnya efektif karena berdasarkan hasil temuan pada Indikator Tercapainya Tujuan dan Indikator Perubahan Nyata, kedua Kegiatan Non-fisik tersebut belum memberikan manfaat yang berkelanjutan terhadap warga masyarakat serta belum memberikan dampak atau perubahan kepada warga Kelurahan Sosromenduran terutama di wilayah diadakannya kegiatan.

E.1.3 Hubungan Antara Kinerja Pemerintah Kelurahan Dengan Efektivitas Program Pembangunan Sarana Prasarana Dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sosromenduran

Terdapat hubungan antara Kinerja Pemerintah Kelurahan yang berorientasi proses pelaksanaan kegiatan dengan Efektivitas Program, hubungannya adalah Kinerja Pemerintah Kelurahan telah mendukung tingkat pencapaian Efektivitas Program. Namun, hanya lebih dominan mendukung tingkat Efektivitas Program untuk kegiatan yang bersifat Fisik, dan belum sepenuhnya mendukung tingkat Efektivitas Program yang bersifat Non-fisik.

E.2 SARAN

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian dan kesimpulan di atas, maka Penulis memberikan saran/rekomendasi sebagai berikut:

1. Diharapkan adanya peningkatan Kinerja Pemerintah Kelurahan Sosromenduran, dalam hal ini melalui usaha-usaha atau kerjasama pelaksana kegiatan untuk mempertahankan dan meningkatkan kemampuan dalam merealisasikan anggaran DAU Tambahan tahun anggaran berikutnya.
2. Diharapkan adanya evaluasi yang lebih mendalam dari Instansi Kelurahan dan para pelaksana kegiatan terkait pencapaian program dari anggaran DAU Tambahan agar lebih memperhatikan tingkat Efektivitas Program atau kegiatan yang bersifat Non-fisik.
3. Diharapkan adanya keseimbangan hubungan antara kinerja

pemerintah kelurahan atau proses pelaksanaan kegiatan dengan mendukung tingkat keseimbangan efektivitas kedua sasaran kegiatan, yaitu kegiatan pembangunan Fisik dan Non-fisik.

4. Perlu adanya penelitian selanjutnya yang tertarik pada Kinerja Pemerintah Kelurahan, dalam hal ini Proses Pelaksanaan Kegiatan yang berfokus pada tingkat Efektivitas Program yang bersifat Non-fisik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Atik, dan Ratminto. 2005. *Manajemen Pelayanan, disertai dengan pengembangan model konseptual, penerapan citizen's charter dan standar pelayanan minimal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Danim, Sudarwan. 2004. *Motivasi Kepemimpinan & Efektivitas Kelompok*. PT Rineka Cipta. Jakarta
- Dwiyanto Indiahono, 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analicys*. Gava Media. Yogyakarta.
- Gunawan. Iwan. 2014. *“Metode Penelitian Kualitatif, Teori dan Praktik”*, Bumi Aksara. Jakarta
- Hariyoso, S. 2002. *Pembaruan Birokrasi dan Kebijakan Publik*. Peradaban. Yogyakarta.
- Hidayat. 1986. *Teori Efektifitas Dalam Kinerja Karyawan*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Herdiansyah. 2010. *“Metodologi Penelitian Kualitatif dan Ilmu-Ilmu Sosial”*. Salemba Humanika. Jakarta.
- Mahsun, Mohamad, 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- Mahmudi, 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Saryono. 2010. *“Metode Penelitian Kualitatif dalam Bidang Kesehatan”*. Yogyakarta. Nuha Medika.
- Siagian, Sondang P. 2008. *Administrasi Pembangunan*. Penerbit, Bumi Aksara. Jakarta.
- Sinambela, Lijan Poltan. 2012. *“Kinerja Pegawai Teori Pengukuran dan Implementasi”*. Penerbit Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno, Edy. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Kencana. Jakarta.
- Toha, Miftah, (2007). *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Wahab, Solichin A. 1997. 2001. 2004. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Media Pressindo. Yogyakarta.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- Wibowo, 2011. *Manajemen Kinerja*. Penerbit Raja grafindo Persada. Jakarta.

Jurnal:

Ahmad Subandi, 2018. *Implementasi Kebijakan Dana Desa Di Desa Neglasari Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor... TahapanProses Kebijakan Publik... UIN SYARIF HIDAYATULLAH*. Jakarta

Deddy Mulyadi, 2019.” *Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Kabupaten Bandung*”. Jurnal ilmu administrasi (JIA). Vol. XVI, No. 1, hal. 69. Di akses pada tanggal 01 Februari 2020.

Dr. Haedar Akib, M.Si. & Dr. Antonius Tarigan. 2008. *ARTIKULASI KONSEP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya*. Jurnal Kebijakan Publik. Makasar. Di akses pada tanggal 01 Februari 2020.

Nisa Agistiani Rachman, 2014. “*Pengukuran Kinerja Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Desa Wisata Brayut*”. JKAP Vol 18, No 2.Hal. 149-150. diakses pada tanggal 02 februari 2020.

Ramdhani & Ramdhani, 2017. “*Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*”. Jurnal Publik. Vol. 11, No. 1. Hal. 7. Diakses pada tanggal 02 februari 2020.

Rustiadi Ernan, Saefulhakim Sunsun dan R. Panuju Dyah. 2011. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Jakarta. Crestpent Press dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Yuwono, Sony, dkk. 2008. *Memahami APBD dan Permasalahannya (Panduan Pengelolaan Keuangan Daerah)*. Edisi Pertama. Malang. Bayumedia Publishing.

Sumber lain:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang *Pemerintahan Daerah*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang *Kecamatan*.

Permendagri RI Nomor 130 Tahun 2018 Tentang *Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan*.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019 Tentang *Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah*.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2019 Tentang *susunan organisasi, kedudukan tugas, fungsi dan tata kerja kecamatan dan kelurahan Kota Yogyakarta*.

Media Internet:

- <https://kertyawitaradya.wordpress.com/2010/01/26/tinjauan-teoritis-Implementasi-kebijakanpublik/>(diakses pada tanggal 10 desember 2019)
- <https://www.kompasiana.com/budisulis/5c089f0aaeebe135dc03f984/hal-yang-perludiperhatikan-dalam-pengelolaan-dana-kelurahan>(diakses pada tanggal 10 desember 2019)
- <https://radarjogja.jawapos.com/2019/01/09/dana-kelurahan-untuk-peningkatan-kesejahteraanmasyarakat/>(diakses pada tanggal 10 desember 2019)
- <https://gedongtengenkec.jogjakota.go.id/page/index/rencana-strategis>(diakses pada tanggal 27 desember 2019)

- <https://gedongtengenkec.jogjakota.go.id/page/index/gambaran-umum>(diakses pada tanggal 9 januari 2020)
- kses pada tanggal 29 Agustus 2020)
- <http://journal2.uad.ac.id/index.php/jpmuad/article/download/483/pdf>(diakses pada tanggal 9 januari 2019)
- <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=10223>(dia